



ISSN: 3063-556X

PROSIDING SEMINAR NASIONAL SANATA DHARMA BERBAGI

70 Tahun Sanata Dharma Menggali Makna dan Membangun Harapan:
Paradigma Keberlanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim

Vol 3, 2025



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SANATA DHARMA BERBAGI
(USDB)

VOL 3, 2025



**“70 Tahun Sanata Dharma Menggali Makna dan
Membangun Harapan: Paradigma Keberlanjutan dan
Tantangan Perubahan Iklim”**

10 Oktober 2025



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL SANATA DHARMA BERBAGI (USDB)

“70 Tahun Sanata Dharma Menggali Makna dan Membangun Harapan: Paradigma Keberlanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim”

Copyright © 2025

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sanata Dharma

REVIEWER:

Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.
Drs. Rubiyatno, M.M.
Aprilla Suriesto Madaun, S.S., M.M.
Tiberius Handono Eko Prabowo, Ph.D.
Antonius Sumarwan, S.J., S.S., M.M., Ph.D.
Dr. Eng. Ir. I Made Wicaksana Ekaputra
Dr. Ir. Budi Sugiharto
Arief Setyanto, S.Si., M.T., Ph.D.
Dr. Hongki Julie, M.Si.
Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.
Dr. Hendra Kurniawan
Dr. Sebastianus Widanarto Prijowuntato, S.Pd., M.Si.
Dr. Kristiawan Indriyanto, S.S., M.Hum.
Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji
Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum.
Sony Christian Sudarsono, S.S., M.A.
FX. Risang Baskara, M.Hum., Ph.D.
Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Bernadus Dirgaprimawan, S.J., S.S., M.A., S.S.D.
Monica Eviandaru Madyaningrum, Ph.D.
Prof. Dr. I Gusti A. S. R. Jayantini, S.S., M.Hum.
Albertus Hariwangsa Panuluh, Ph.D.
Dr. Josephine Wuri
Dr. Ir. Anastasia Rita Widiarti
apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
Dr. Florentinus Dika Octa Riswanto, M.Sc.
Andreas Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
apt. Agustina Setiawati, M.Sc., Ph.D.
Alexander Baena, Ph.D.

PEMBICARA UTAMA:

Christoforus Bayu Riyanto, S.J., M.A., Ph.D.
Dr. Aquilina Tanti Arini

TANGGAL SEMINAR

10 Oktober 2025

PROSIDING Vol 3, 2025

ISSN: 3063-556X

DITERBITKAN OLEH:



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55281.
Telp (0274) 513301 Ext 1527

PEMIMPIN REDAKSI:

A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

DEWAN REDAKSI:

Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji
A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
Aprilla Suriesto Madaun, S.S., M.M.
Prof. Dr. I Gusti A. S. R. Jayantini, S.S., M.Hum.
apt. Agustina Setiawati, M.Sc., Ph.D.

STEERING COMMITTEE:

Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji
Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.
Eko Budi Santoso, S.J., S.Pd., Ph.D.
Dr. Hongki Julie, M.Si.
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.
Hendra Michael Aquan, S.Si., MEnvMgmt.
Dr. Firma Sulistiyowati, Ak.

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi tahun 2025 mengambil tema yang sangat menarik, sekaligus sangat sensitif, yaitu: “Krisis Iklim: Mitos atau Fakta?” Arah dari tema ini sebenarnya sudah cukup jelas, yakni bahwa krisis iklim merupakan fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Perubahan iklim bukanlah “mitos” yang tidak berdasarkan fakta. Sebaliknya, perubahan iklim kian terasa sebagai bagian dari pengalaman agonistik sehari-hari dari sebagian besar penduduk bumi. Data saintifik terus bertambah dan semakin tajam mengenai prediksi bencana iklim yang tak terbendung lagi bila kita tidak segera membuat kebijakan dan langkah yang jelas secara kolektif.

Namun, pada saat planet bumi sedang berada dalam krisis besar, politik masih bergerak ke arah lain, yakni pada kepentingan nasional yang semakin sempit atau persoalan global yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan manusia dalam jangka pendek. Politik seperti inilah yang dikritik oleh Bruno Latour yang menggambarkan situasi krisis iklim sebagai “the new climatic regime.” (Latour, *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*, 2018) Dengan istilah ini, Latour menggambarkan betapa krisis iklim telah mengubah kenyataan secara luas dan mendalam, yang melahirkan sebuah tatanan dan tuntutan, atau rezim, baru. Konteks dari krisis iklim ini adalah keruntuhan modernitas. Latour menyatakan bahwa proyek modernitas yang menjanjikan kemajuan dan pertumbuhan tak terbatas telah gagal. Akibatnya, kita sudah kehilangan kerangka kerja bersama untuk memahami dunia, yang menyebabkan adanya “delirium epistemologis” dan kebingungan epistemologis yang mendalam.

Perlu diingat bahwa krisis lingkungan ini tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial. Rezim iklim baru ini ditandai dengan krisis iklim dan sosio-ekonomi yang saling terkait, yang memengaruhi semua aspek kehidupan dan menciptakan ketidakstabilan di berbagai wilayah. Situasi ini menjadi semakin parah karena hilangnya narasi bersama yang seharusnya bisa mengarahkan gerak bersama. Menurut Latour, sekarang tidak ada lagi narasi universal tunggal tentang “menjadi modern” dan mencapai peradaban dan kemajuan yang berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan pemikiran ulang yang dasariah tentang eksistensi manusia, planet bumi, dan seluruh semesta. Kita harus mengakui bahwa manusia hidup di satu planet yang terbatas, sebuah realitas eksistensial yang harus memandu upaya kita. Untuk keluar dari kebingungan ini, Latour menyerukan pencarian narasi baru yang bisa mempersatukan kembali umat manusia, melampaui gagasan pertumbuhan ekonomi dan konsumerisme yang tidak berkelanjutan.

”Rezim Klimatik Baru” menantang kita untuk menghadapi krisis iklim dan kegagalan modernitas, serta mencari cara baru untuk memahami diri kita dan dunia kita sebagai penghuni satu planet. Yang jelas, politik harus diarahkan pada “bumi” (down to earth). Kehidupan kita di bumi adalah perkara yang paling mendesak untuk dipikirkan kembali. Tantangan terbesar kita adalah belajar untuk hidup di bumi.

Dalam perspektif pemikiran ini, Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi 2025 adalah usaha untuk membangun narasi baru yang memiliki kekuatan sebagai “mitos” dalam arti yang paling fundamental, yakni suatu narasi besar milik bersama yang memberi makna asali dan sanggup mendorong dan memotivasi umat manusia untuk bertindak. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi interdisipliner seperti yang tercermin dalam presentasi, paper dan diskusi Sanata Dharma Berbagi ini. Semoga pada saatnya semua gagasan yang tercurah dalam Seminar Nasional ini berbuah pada transformasi yang lebih luas.

Terimakasih kami ucapkan kepada para pembicara, pemakalah dan moderator; juga seluruh Panitia, LPPM dan semua kolaboratornya atas kerja keras dan dedikasinya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh makna.

Tuhan memberkati kita semua dan seluruh semesta.
Ad Maiorem Dei Gloriam

Rektor
Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Tahun ini, Universitas Sanata Dharma genap berusia 70 tahun — sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghidupi semangat untuk membangun harapan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perjalanan tujuh dekade ini, Sanata Dharma terus berupaya menghadirkan ruang pembelajaran yang hidup dan relevan dengan tantangan zaman. Salah satu wujudnya adalah melalui kegiatan Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi 2025, yang tahun ini mengusung tema: “Menggali Makna dan Membangun Harapan: Paradigma Keberlanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim.”

Tema ini diangkat dari kesadaran bahwa isu perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan secara fisis, tetapi juga menimbulkan beragam persepsi dan respons sosial yang kompleks. Karena itu, seminar ini berupaya menghadirkan ruang refleksi dan dialog lintas disiplin untuk mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan, praksis, serta kesadaran kemanusiaan dalam merespons krisis lingkungan.

Prosiding ini disusun sebagai salah satu luaran dari Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi 2025. Kumpulan tulisan di dalamnya merekam pemikiran, hasil penelitian, dan refleksi praksis dari para akademisi, peneliti, praktisi, serta pemerhati isu keberlanjutan dari berbagai institusi. Melalui prosiding ini, kami berharap semangat berbagi pengetahuan dan membangun harapan yang menginspirasi seminar ini dapat terus hidup dan menyebar lebih luas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber panel, yakni:

- Christoforus Bayu Risanto, S.J., M.A., Ph.D., yang berbagi tentang pemodelan iklim;
- Dr. Aquilina Tanti Arini, yang membahas persepsi masyarakat terhadap isu perubahan iklim; dan
- Dr. Marcelinus Andi Rudhito, yang memoderasi dan menuntun refleksi ilmiah dalam diskusi panel.

Terima kasih kami haturkan juga kepada para narasumber simposium:

- Antonius Sumarwan, S.J., S.S., M.M., Ph.D., yang membahas ESG (Environmental, Social, and Governance);
- Ir. Bernardinus Sri Widodo, M.Eng., yang mengulas piranti untuk mitigasi perubahan iklim;
- Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si. & Hendra Michael Aquan, S.Si., MEnvMgmt., yang berbagi tentang pendidikan berkelanjutan;
- Dr. Apri Damai Sagita Krissandi, S.S., yang berbicara di bidang sastra dan sosial humaniora;
- Carla Sih Prabandari, M.Hum., Ph.D., yang mendiskusikan integrasi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tentang SDGs; dan
- Fr. Rahayuningsih, M.A., yang menyoroti peran AI dan pustakawan dalam keberlanjutan ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh kontributor pemakalah, yang berasal dari lebih dari 60 institusi pendidikan, penelitian, bisnis, organisasi masyarakat, dan komunitas. Kehadiran dan keragaman pemakalah menjadi bagian penting dalam semangat kolaboratif yang dihidupi dalam seminar ini. Bidang-bidang diskusi yang disajikan dalam prosiding ini mencerminkan keragaman cara pandang dan upaya nyata untuk berkontribusi pada isu iklim dan keberlanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para mitra dan organisasi masyarakat, WALHI Jawa Timur, WALHI Jawa Tengah, dan Solidaritas Perempuan Kinasih, yang telah berbagi melalui video refleksi tentang perjuangan nyata dalam isu keberlanjutan lingkungan.

Secara khusus, terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para reviewer yang telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk membuat tulisan – tulisan menjadi lebih bernas.

Terima kasih bagi para panitia, serta seluruh sistem pendukung Universitas Sanata Dharma yang bekerja dengan penuh dedikasi di balik layar, sehingga kegiatan ini dan prosiding ini dapat terwujud.

A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM IMUN: TINJAUAN PUSTAKA NARATIF	
Yuliana.....	1
DIMENSI EKOLOGIS PENGETAHUAN LOKAL KEBENCANAAN DI SULAWESI TENGAH PADA BENCANA ALAM 28 SEPTEMBER 2018	
Jefrianto	10
STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIMNGADIREJO, KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH	
Albertin Yesica Stevani Tumimomor, Aldy Herindra Lasso	21
PERSEPSI, SIKAP, DAN RESPONS PUSTAKAWAN TERHADAP KECERDASAN BUATAN DALAM LAYANAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	
Hana Isnaini Al Husna.....	33
MEMBANGUN KETANGGUHAN KEBIJAKAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM HIDROMETEOROLOGI	
Alfin Dwi Novemyanto, Rismawati Nur, Tegar Raffi Putra Jumanoro	42
HISTORISITAS RELASI GAJAH-MANUSIA: POETIKA KULTURAL GAJAH DALAM TEKS-TEKS MELAYU	
Riqko Nur Ardi Windayanto, Muhammad Heno Wijayanto	56
REFLEKSI ANTROPOSENTRISME TERKAIT KONDISI ALAM DALAM GAMBARAN TEKS <i>KAWISESAN</i> BALI	
Pande Putu Abdi Jaya Prawira	72
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DESA WISATA UNTUNG JAWA KEPULAUAN SERIBU JAKARTA	
Suharsono, A.Y. Agung Nugroho, Alfonso Harrison, V. Rachmadi Parmono.....	83
ANALISIS PEMANFAATAN DAN DAMPAK <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA	
Xalastinus Jasper Hanta.....	93
PENGARUH EDUKASI ENERGI TERBARUKAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SMA TENTANG ENERGI RAMAH LINGKUNGAN	
Maria Imaculada J.J, Ardyanto Allolayuk dan Eritrina Sofia A.....	103

TRANSFORMASI PENDIDIKAN MENUJU BUDAYA KEBERLANJUTAN DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO

Satungale Kurniawan 111

KAJIAN POTENSI, TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PASTORAL DI GEREJA STASI KRISTUS BANGKIT, KARANG JOANG, BALIKPAPAN UTARA

Clara Gemellia Maharani, Dewi Juita Barutu, Johanes Baptis Judha Jiwangga, Nico Ndaru Pratama 122

PEMANFAATAN DATA MAKROEKONOMI UNTUK MITIGASI RISIKO IKLIM PERBANKAN (STUDI KASUS: BANK LAMPUNG)

Leonard Tiopan Panjaitan, Denny Sudrajat 136

PENGUATAN PERAN GENERASI MUDA DALAM MERAWAT LINGKUNGAN MELALUI SPIRITUALITAS LAUDATO SI'

Norbertus Tri Suswanto Saptadi 149

ANALISIS TOLERANSI SISWA SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN ALGORITMA *DECISION TREE* BERDASAR DATA ASESMEN NASIONAL 2023

Marcellinus Andy Rudhito, Imanuel Credo Paskalis, Kerin Nofi Ariska dan Benediktus Yoseph Agri Jonathan 159

KOLABORASI PSIKOEDUKATIF PUSTAKAWAN UAD DAN KB TK CHIPMUNK MELALUI STORYTELLING DI POJOK BACA

Anjas Alifah Bakry 171

TELAAH LITERATUR: PENDEKATAN ADAPTASI, MITIGASI, DAN SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI NTT

Welresna Juliatri Putri Rupiasa, Diana Tri Astuti, Imelda Sussanti Nailius, Kartika Ariaswara, Yohanes Patrik Adventus Banda 183

PENGUATAN KOMPETENSI LITERASI DATA PUSTAKAWAN PADA ERA PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI BIDANG RISET: KAJIAN TEORITIS

Mifta Olievina Wardhani, Nurdiansyah 199

SISTEM REKOMENDASI BUKU MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING DENGAN PENERAPAN ALGORITMA BEST MATCHING 25

Elisabeth Diva Athalia Susetio, Kartono Pinaryanto 209

KONTRIBUSI PUSTAKAWAN SEKOLAH MENGHADAPI DISRUPSI IMPLEMENTASI KURIKULUM AI DI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Anita Desi Fitriana 221

PENGEMBANGAN MODUL PROYEK DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Christina Wahyu Cahyani, Agung Hartoyo, dan Asriah Nurdini Mardiyyaningsih 233

REFLEKSI BIBLIS LUKAS 10:29-37 DAN RELEVANSINYA BAGI GERAKAN ANTI PERDAGANGAN MANUSIA OLEH TALITHA KUM YOGYAKARTA

Bryan Jovi Nistell Roy Hutagalung 245

HUBUNGAN *SELF-EFFICACY*, KREATIVITAS GURU, DAN LINGKUNGAN BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA

Purohito Catur Bhakti Acarya, Natalina Premastuti Brataningrum 255

ANALISIS SPASIAL POTENSI PEMANENAN KABUT SEBAGAI STRATEGI ADAPTASI IKLIM DI DESA WONOLELO, SAWANGAN, MAGELANG

Edi Widodo, Nursida Arif, Nurumuhniyanti M. Hubaib , Shofi Roossalina Mustikasari 264

PENGEMBANGAN FILM PENDEK “BATAS MIMPI” SEBAGAI PUBLIKASI SITUASI PENDIDIKAN DI SDN 36 MANIS MATA, AIR UPAS, KETAPANG

Rosalina Angel Prita Erika, Aprilia Diva Anggarawati, dan David Lanang Kusuma, Johannes Baptis Judha Jiwangga, Sebastianus Widanarto Prijowuntato 274

PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAYAK SIMPAKNG MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI

Michael Diva Berliano, Dheandra M. D. P Simbolon, Ade Rika Wulandari, Johannes Baptis Judha Jiwangga, Sebastianus Widanarto Prijowuntato 295

KESADARAN ETIK DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI KRISIS IKLIM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (PERSPEKTIF IMMANUEL KANT DAN PAULO FREIRE)

Rahmat Effendi, Makmur Rizka 303

GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA ESG: TRANSPARANSI, ETIKA, DAN AKUNTABILITAS PERUSAHAAN

Dannizar Azka Taftazani Aarsal 316

MAGNA FIZZ: PENGEMBANGAN MINUMAN EFFERVESCENT FUNGSIONAL DARI KULIT MANGGIS (*Garcinia mangostana L.*) DAN NANAS (*Ananas comosus*) UNTUK INOVASI NUTRASETIKAL BERKELANJUTAN

Natasya Nathania, Jonathan Halim Sugianto, Teresa Narendraputri, Y.A.S Putra, Victoria Kristina Ananingsih..... 327

RANCANGAN PEMBELAJARAN KOPI LINTAS DISIPLIN BERBASIS KEARIFAN LOKAL “PATANJALA”

M. Rafi Somantri 335

MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERKOTAAN UNTUK PENGELOLAAN MINYAK JELANTAH (*UCO/USED COOKING OIL*) RUMAH TANGGA STUDI KASUS BANK SAMPAH SEROJA BESTARI KOTA BOGOR

V. Rachmadi Parmono, George Martin Sirait, Lamtiur H. Tampubolon 353

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GAYA HIDUP HEDONIS, DAN PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA

Ploren Nika Lidia, Natalina Premastuti Brataningrum 367

PAHAM KETUHANAN DALAM TRADISI MELANGUN PADA MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS

Paulus Tegar Setiadi 379

**YANG TAK TERLIHAT DALAM BADAI: TANTANGAN PENYANDANG DISABILITAS
PSIKOSOSIAL DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA**

Rafinne Oktavita Mega..... 392

**KETAHANAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL: STUDI LITERATUR
SEBAGAI TRANSFORMASI PANGAN MENUJU INDONESIA MAJU 2045**

Lamsihar Alex Siregar, Dyah Wulandari, dan Christina Retnaningsih..... 402

**HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM DALAM SERAT GEMBRING BARING KARYA
RADEN RONGGO PRAWIRODIRDJO III (TINJAUAN EKOKRITIK)**

Najib Zahro’u..... 422

**KEKERASAN IMAN DAN JAWABAN KITAB SUCI: PANGGILAN DAN MISI GEREJA
MENJADI PEMBAWA DAMAI**

L. Rio Hardianto 435

**INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN AKUNTANSI KURIKULUM MERDEKA
BERBASIS *WEBSITE* DI SMK NEGERI 1 DEPOK**

Ignasia Yolasti Krishardita, Sebastianus Widanarto Prijowuntato..... 443

**PENGOLAHAN TERINTEGRASI SAMPAH DAUN DAN LIMBAH HEWAN UJI DI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Jeffry Julianus, Apollinaris Bima Windura, Yohanes Sigit Ariyanto, Ignasius Trisna Laksana,
Yohanes Dwiarmaka..... 450

**GRAF INTERVAL DAN APLIKASINYA DALAM PENGATURAN WAKTU LAMPU
LALU LINTAS**

Maria Vianney Any Herawati 462

MAKNA METAFORIS KATA *HIJAU* DALAM BAHASA INDONESIA

F.X. Sinungharjo 470

**KONSEP PENGENALAN DIRI PADA ANAK-ANAK DI STASI SANTA MARIA
PENTAKOSTA, SAMBOJA BARAT BERBASIS METODE JOURNALING**

Bening Setia Pangestu, Serafine Marsha Ludy Andrea, Johanes Baptis Judha Jiwangga, Nico
Ndaru Pratama 480

NEKRO-EKONOMI: MENAFSIR KEPUNAHAN, MENSIASATI MASA DEPAN

Wilhelmus F. N. Runesi..... 500

**PEMAHAMAN PENGELOLAAN EMOSI PADA RENTANG USIA REMAJA DI PAROKI
ST. MARIA DARI FATIMA PENAJAM**

Elisabeth Novita Krisdiana, Maria Cicinda Diwa, Helentiera Amerlis Fanaetu, Johanes Baptis
Judaha Jiwangga, Nico Ndaru Pratama..... 515

**PEMBELAJARAN BERBASIS *ENGINEERING DESIGN PROCESS* DALAM
MENANAMKAN KESADARAN AKAN PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANFAATAN
ENERGI TERBARUKAN**

Nadya Ursula Sarasdewi H..... 528

MODUL AJAR BERDIFERENSIASI BERBASIS PARADIGMA PEDAGOGI REFLEKTIF
UNTUK MEMFASILITASI PEMECAHAN MASALAH DAN PENALARAN MATEMATIS

Fibelia Dwi Puspaningrum, Haniek Sri Pratini 537

GREEN LITERACY SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN LINGKUNGAN UNTUK
GENERASI Z: STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @teensgogreen.id

Taltsania Elysia Hidayat 545

GREENWASHING SEBAGAI STRATEGI KORPORASI: TELAAH KRITIS ESG DALAM
KERANGKA TEORI LEGITIMASI

Sesa Malinda 550

EVOLUSI ESG DI DUNIA DAN ADOPSINYA DI INDONESIA

Antonius Sumarwan 560

PAMALI DI LEUWEUNG GEDE: KAJIAN HISTORIS DAN NILAI-NILAI KEARIFAN
LOKAL DALAM MEMPERTAHANKAN EKOSISTEM HUTAN DI KAMPUNG ADAT
KUTA KABUPATEN CIAMIS

Yadi Kusmayadi, Ahliha Nurrohmah, dan Rijal Mubarak 578

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI GAYA BELAJAR SISWA
DALAM MODEL *JIGSAW* UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER DAN
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

FX. Agus Hariyanto 590

PENGETAHUAN TRADISIONAL NOMAD LAUT ASIA TENGGARA DAN TATA
KELOLA EKOSISTEM PESISIR DAN KEPULAUAN

Henry Thomas Simarmata, Mia Gisella Kartika Pasaribu, Yohana Patricia 604

VIRTUE ETHICS: PENTINGNYA ETIKA DALAM KOMUNIKASI PUBLIK PADA
ORGANISASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA KEGAGALAN KOMUNIKASI
PUBLIK HASAN NASBI, KEPALA KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN)

Aprilla Suriesto Madaun 621

MENGINTEGRASIKAN KEBERLANJUTAN DAN SPIRITUALITAS: GEREJA MARIA
ASSUMPTA KLATEN SEBAGAI MODEL ARSITEKTUR BERKELANJUTAN DALAM
KONTEKS SDG

Dionius B. Mahamboro, Michael R. Pabubung, dan Fransiskus N.L. Teluma 630

PERAN PUNGGAWA DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
NON-FORMAL BERBASIS KOMUNITAS NON-PROFIT DI KAGEM JOGJA

Mutiara Tyas Kingkin, Amalia Chairunnisa Rosyid 643

STRATEGI PENERJEMAHAN PEMINJAMAN ISTILAH FAUNA INGGRIS-INDONESIA
DAN IMPLIKASINYA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS AKUN
X ‘NATIONAL GEOGRAPHIC ANIMALS’

Muhamad Saiful Mukminin 657

PENGUNAAN CHATGPT OLEH MAHASISWA DALAM MENANGGAPI ISU SOSIAL
DAN PERAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Patricia Ikaria Ratnasari, Muthik Humaida 670

**METODE DIFRAKTIF BAGI NORMATIVITAS: MEREKONSTRUKSI KEBENARAN
DAN TANGGUNG JAWAB DALAM POSTHUMANISME**

Fitrilya Anjarsari 687

**“MELEBAR-MENYEMPIT” DALAM *AGROFORESTRY* TANAMAN PANGAN:
INVENTARISASI PERKEMBANGAN AGROFORESTRY DI KAWASAN SABUK
PEGUNUNGAN UNGARAN**

Henry Thomas Simarmata, Alberta Rika Pratiwi, Bernadeta Soedarini, Yustina Trihoni Nalesti
Dewi 704

**PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR PENGENALAN PRASASTI PENINGGALAN
SEJARAH HINDU-BUDDHA BAGI SISWA SMP BERBASIS AUGMENTED REALITY**

Louisa Leokadja, Anastasia Rita Widiarti 716

**KADAR ASAM URAT UMAT STASI SANTO MIKAEL ITCI DALAM TRADISI ‘SAMBUT
BARU’**

Valentia Nova Ananda, Albertus Bogi Kurniawan, Aurelia Maria Wulan R., Johanes Baptis
Judha Jiwangga, dan Nico Ndaru Pratama 723

**MEMBANGUN SPIRITUALITAS EKOLOGIS: RELEVANSI PEMIKIRAN THOMAS
BERRY DAN PAUS FRANSISKUS DI KONGREGASI SUSTER DSY MANADO**

Elisabet Maria Fofid 735

**MAPPING THE RESEARCH EVOLUTION OF ESG RISK AND SOCIAL IMPACT
ASSESSMENT: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS**

E. Septyana Dyah Susilowati Argaryni, Raden Roro Maria Anggraeni Paramita Sari, Grace
Jubilate Panjaitan, and Josephine Wuri 747

**TUBUH YANG TERLUPAKAN: KESADARAN EKOLOGIS HARUS DIMULAI DARI
TOILET UMUM?**

Wilhelmus Tarsiani Alang 764

**KESADARAN HUBUNGAN ALAM DAN MANUSIA SEBAGAI MITIGASI
KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA (KAJIAN PADA
MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA)**

Neng Marlina Efendi, S.Pd., M.A. 773

**PENGENALAN NADA PIANIKA MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL NEURAL
NETWORK***

Yahya Hanadi Arimatea, Linggo Sumarno 782

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 6 DI SD N 06 MANIS MATA, TERUSAN

Rosa de lima Lay Martins, Michael Dewa Arya Putra Setiawan, Reny Herlinawati³,
Sebastianus Widanarto Prijowuntato dan Johanes Baptis Judha Jiwangga 804

**REFLEKSI TEOLOGIS ATAS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: *LAUDATE DEUM*
SEBAGAI PARADIGMA SPIRITUALITAS KEBERLANJUTAN**

Agustinus Frengky Renanda, Yohanes Robiyantoro 815

**VIRTUE ETHICS: PENTINGNYA ETIKA DALAM KOMUNIKASI PUBLIK PADA
ORGANISASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA KEGAGALAN
KOMUNIKASI PUBLIK HASAN NASBI, KEPALA KANTOR KOMUNIKASI
KEPRESIDENAN)**

Aprilla Suriesto Madaun

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
april@usd.ac.id

Abstrak

Komunikasi publik yang efektif dan beretika adalah landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik pada organisasi pemerintahan, dengan fokus pada dampak kegagalan komunikasi terhadap kredibilitas institusi. Melalui studi kasus pada kontroversi komunikasi publik yang melibatkan Hasan Hasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, penelitian ini menganalisis bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip etika komunikasi dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kasus dan analisis data melalui *literature review* terhadap teori *virtue ethics*, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik, laporan media, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik sangat penting posisinya untuk membangun dan mempertahankan legitimasi pemerintah. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi, seperti terlihat dalam kasus yang diteliti, dapat menggerus kepercayaan publik, menurunkan kredibilitas institusi, dan mengganggu efektivitas kebijakan pemerintah. Penelitian ini menekankan perlunya *framework* etika komunikasi yang jelas dalam organisasi pemerintahan untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa.

Kata kunci: *virtue ethics*, komunikasi publik, tata kelola, organisasi, etika

**VIRTUE ETHICS: THE IMPORTANCE OF ETHICS IN PUBLIC
COMMUNICATION WITHIN GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (A CASE
STUDY ON THE PUBLIC COMMUNICATION FAILURE OF HASAN NASBI, HEAD
OF THE PRESIDENTIAL COMMUNICATION OFFICE)**

Aprilla Suriesto Madaun

University of Sanata Dharma, Indonesia
april@usd.ac.id

Abstract

Effective and ethical public communication constitutes a fundamental foundation for good governance. This study aims to analyze the significance of implementing virtue ethics in public communication within governmental organizations, with a focus on the impact of communication failures on institutional credibility. Through a case study examining the public communication controversy involving Hasan Hasbi as Head of the Presidential Communication Office, this research analyzes how violations of communication ethics principles can influence public trust in government. This study employs a qualitative approach with case study data collection methods and data analysis through literature review of virtue ethics theory, public communication, and governance. Secondary data were obtained from various academic sources, media reports, and official government documents. The findings

indicate that the implementation of virtue ethics in public communication is critically important for building and maintaining government legitimacy. Failures in applying communication ethics principles, as demonstrated in the examined case, can erode public trust, diminish institutional credibility, and disrupt the effectiveness of government policies. This study emphasizes the necessity of a clear communication ethics framework within governmental organizations to prevent the recurrence of similar failures.

Keywords: virtue ethics, public communication, governance, organization, ethics

1. Pendahuluan

Komunikasi publik adalah unsur mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik sangat vital peranannya karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kepercayaan publik ini dapat dibangun melalui komunikasi yang efektif, di mana pemerintah menyampaikan kebijakan dengan jelas agar dapat mempertahankan legitimasi institusional. Dengan demikian, komunikasi publik perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Jika tidak, maka akan berdampak negatif pada kredibilitas pemerintah dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Dengan melihat dinamika di Indonesia dewasa ini, peran komunikasi publik semakin strategis sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mendukung kecepatan penyebaran informasi. Menurut Putra (2024), sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia telah mengalami transformasi penting dalam hubungan antara media dan politik. Lanskap media politik di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik negara yang beragam dan terus berkembang. Efeknya adalah setiap pernyataan atau sikap politik yang diambil oleh pejabat pemerintah, terlebih yang berwenang dalam komunikasi publik, dapat dengan cepat menjadi viral dan berpengaruh luas terhadap opini publik.

Terkait komunikasi publik pejabat pemerintah, terdapat sebuah kasus yang memicu kontroversi baru-baru ini. Kasus ini melibatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Seperti yang dituliskan oleh Wijayaatmaja (2025) di Harian Media Indonesia, kasus ini berawal dari tanggapan Hasan terhadap insiden teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Hasan menanggapi teror tersebut dengan berkata, “Ya sudah, dimasak saja”. Tanggapannya tersebut dinilai publik sebagai respon yang tidak etis. Kontroversi ini akhirnya berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada April 2025.

Menurut peneliti, kasus ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif etika dalam tata kelola organisasi. *Virtue ethics* atau etika keutamaan, sebuah pendekatan etika yang dikembangkan oleh Aristoteles yang menekankan pada karakter dan keutamaan moral individu, akan menjadi dasar dalam kajian ini. Peneliti menilai etika merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia pada umumnya, dan manajemen organisasi pada khususnya. Dalam konteks komunikasi publik, *virtue ethics* dapat memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana karakter dan keutamaan moral seseorang dapat mempengaruhi efektivitas dan dampak komunikasinya.

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *virtue ethics* dalam komunikasi publik dapat berperan dalam mengembangkan tata kelola organisasi pemerintahan? Dan bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penting penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik organisasi pemerintahan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan komunikasi publik dalam kasus Hasan Nasbi, dan merekomendasikan pengembangan *framework* etika komunikasi yang lebih baik dalam organisasi pemerintahan.

2. Tinjauan Pustaka

Virtue Ethics dalam Perspektif Aristoteles

Virtue ethics atau etika keutamaan merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam filsafat moral, bersama dengan deontologi dan konsekuensialisme (Hursthouse & Pettigrove, 2023). Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* dan kembali mendapat perhatian dalam diskusi etika kontemporer (MacIntyre, 2007).

Menurut Aristoteles (2009), *virtue* (keutamaan) adalah disposisi karakter yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara tepat dalam keadaan tertentu. Keutamaan bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan diusahakan melalui praktek dan kebiasaan yang konsisten. Aristoteles membagi keutamaan menjadi dua jenis: keutamaan intelektual dan keutamaan moral (Sherman, 1989). Bagi Aristoteles (2009), keutamaan intelektual terdiri dari lima aspek: akal budi (*nous*), kebijaksanaan teoritis (*sophia*), pengetahuan ilmiah (*episteme*), kebijaksanaan praktis (*phronesis*), dan keterampilan (*techne*). Sementara keutamaan moral meliputi berbagai keutamaan seperti empati, keberanian, kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan (Foot, 2001).

Dalam rangka komunikasi publik, konsep *phronesis* atau kebijaksanaan praktis menjadi sangat relevan. *Phronesis* merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip moral dalam situasi nyata dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks tertentu (Sherman, 1989). Seseorang yang mempunyai *phronesis* akan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, dan kepada pendengar yang tepat.

Komunikasi Publik dalam Tata Kelola Organisasi Pemerintahan

Komunikasi publik dalam konteks tata kelola organisasi pemerintahan dapat diartikan sebagai mekanisme pertukaran informasi, ide, dan nilai-nilai antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan publik (Lee, 2008). Komunikasi publik yang efektif mempunyai beberapa ciri utama: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan inklusivitas (Grunig & Hunt, 1984). Karakteristik-karakteristik ini harus senantiasa diperhatikan oleh para juru bicara pemerintahan dalam menyampaikan informasi agar kepercayaan publik senantiasa terjaga.

Di era digital sekarang ini, komunikasi publik berhadapan dengan tantangan baru berupa penyampaian informasi yang serba cepat sehingga terdapat potensi misinformasi (Tench & Yeomans, 2009). Media sosial dan platform digital lainnya menjadi pendukung utama dalam penyebaran informasi dengan kecepatan tinggi ini. Namun, karena kecepatan tersebut, risiko terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru juga mengalami peningkatan. Dengan kondisi seperti ini, peran juru bicara dalam pemerintahan menjadi semakin strategis karena mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat (Broom & Sha, 2013). Mereka tidak hanya bertugas menyalurkan informasi, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Kredibilitas dan Legitimasi dalam Komunikasi Pemerintahan

Kredibilitas adalah aset yang sangat penting dan berharga bagi lembaga pemerintahan (Kriyantono, 2015). Kredibilitas tercipta jika antara perkataan dan tindakan selalu konsisten, penyampaian informasi dilakukan secara transparan, dan kebutuhan masyarakat direspon dengan cepat. Pada saat kredibilitas mengalami degradasi, efeknya dapat meluas ke aspek lain di pemerintahan. Ketika kredibilitas runtuh, usaha untuk membangunnya kembali akan lebih sulit.

Legitimasi pemerintahan, di sisi lain, terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap wewenang dan hak pemerintah untuk mengatur mereka. Legitimasi dapat didapatkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui komunikasi publik yang efektif dan etis (Lee, 2008).

Komunikasi yang kurang efektif dan tidak etis dapat menggerus legitimasi yang dimiliki pemerintah dan mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil. Efeknya tentu saja akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi program yang direncanakan oleh organisasi pemerintahan terkait.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada penemuan dan pemahaman mendalam tentang makna atau sifat dari suatu fenomena sosial, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa (Sekaran & Bougie, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi publik secara mendalam dari perspektif *virtue ethics*, yang membutuhkan analisis yang komprehensif terhadap konteks, makna, dan interpretasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus dengan berfokus pada kasus Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Menurut Sekaran & Bougie (2016), studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan penelitian yang mendalam terhadap fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi pemerintah berupa pernyataan resmi, siaran pers, dan dokumen kebijakan terkait komunikasi publik. Selain itu, data juga didapatkan dari laporan media berupa berita, artikel, dan laporan investigasi dari berbagai media massa mengenai kasus yang diteliti. Literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik tentang *virtue ethics*, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan dijadikan juga sebagai sumber data.

Analisis data dilakukan melalui *literature review* yang sistematis. *Literature review* dilakukan dengan memilih dokumen yang tersedia tentang topik, yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk mengungkapkan pandangan tertentu tentang sifat topik dan bagaimana topik itu akan diselidiki (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, pertama-tama, peneliti mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti menganalisis isi dari berbagai sumber data untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Ketiga, peneliti mensintesa temuan dari berbagai sumber tersebut dengan kerangka teoritis *virtue ethics* untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Terakhir, peneliti menginterpretasi temuan dalam konteks yang lebih luas dan memberikan penilaian kritis terhadap fenomena yang diteliti berupa analisa dampak dan *framework* perbaikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Profil Kasus: Kontroversi Pernyataan Hasan Nasbi

Hasan Nasbi merupakan seorang konsultan politik yang ditetapkan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada periode pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai juru bicara tim kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dan merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Network (Buana, 2025). Kontroversi dimulai ketika Hasan Nasbi menanggapi insiden teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi majalah Tempo. Tanggapannya dinilai publik sebagai respon yang tidak etis, yang kemudian memicu kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis, aktivis, dan masyarakat umum (Ayu, 2025).

Kritik yang dilayangkan terhadap Hasan Nasbi tidak hanya menyoroti substansi pernyataannya, tetapi juga waktu dan cara penyampaian yang dianggap kurang tepat. Sebagai seorang pejabat yang menduduki posisi strategis dalam komunikasi publik, ia dinilai seharusnya dapat menunjukkan empati dan tindakan yang beretika terhadap isu-isu yang

berkaitan dengan kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Tekanan publik yang terus meningkat akhirnya mendorongnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 April 2025 (Harbowo & Susilo, 2025). Dalam surat pengunduran dirinya, ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjamin kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang.

Analisis Virtue Ethics dalam Kasus Hasan Nasbi

a. Kegagalan dalam Keutamaan Intelektual

Dalam perspektif *virtue ethics*, kesalahan utama Hasan Nasbi terletak pada lemahnya *phronesis* atau kebijaksanaan praktis. *Phronesis* terkait dengan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi konkret dan mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan konteks yang ada. Menurut Aristoteles (2009), seseorang dengan kebijaksanaan praktis dapat melihat dengan jelas apa yang baik untuk dirinya dan bagi manusia pada umumnya. Aristoteles bahkan memberikan contoh bahwa orang yang pandai mengelola rumah tangga dan negara dapat dikatakan memiliki kebijaksanaan praktis.

Dalam kasus ini, Hasan Nasbi gagal menunjukkan kebijaksanaan praktis dalam beberapa aspek. Ia gagal dalam mempertimbangkan dengan baik konteks teror terhadap jurnalis sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers. Terkait hal ini, ia tidak menunjukkan sensitifitas terhadap situasi yang sedang terjadi. Ketika ia menyampaikan tanggapannya, ia juga tidak mempertimbangkan suasana emosional publik yang sedang prihatin terhadap insiden tersebut. Selain itu, pilihan kata yang ia gunakan, “*Sudah, dimasak saja*”, juga terkesan meremehkan atau tidak empatik terhadap korban teror.

b. Kurangnya Keutamaan Moral

Aristoteles (2009) menekankan pentingnya keutamaan moral seperti empati dan keadilan dalam interaksi sosial. Baginya, keutamaan moral diperoleh melalui pengulangan tindakan yang sesuai. Artinya, keutamaan moral muncul sebagai hasil dari kebiasaan. Tidak satu pun keutamaan moral muncul dalam diri manusia secara alami, tetapi diadaptasi oleh alam untuk menerimanya, dan disempurnakan oleh kebiasaan. Dalam hal ini, manusia hanya bisa adil dengan melakukan tindakan-tindakan adil, bersikap tenang dengan melakukan tindakan-tindakan yang tenang, berani dengan melakukan tindakan-tindakan yang berani. Dengan demikian, untuk memiliki keutamaan seperti empati dan sikap adil, seseorang perlu membiasakan tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya keutamaan yang dituju.

Dalam kasus Hasan Nasbi, kurangnya empati terhadap situasi yang dialami jurnalis dan media massa menjadi salah satu faktor utama yang memicu kontroversi. Empati dalam komunikasi publik bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan merespons dengan cara yang tepat. Kegagalan dalam menunjukkan empati dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi efektivitas komunikasi publik. Seyogyanya, setiap pejabat publik perlu senantiasa menunjukkan sikap empatik dalam tindakan yang dilakukan agar keutamaan moral tercipta secara otentik, bukan seolah-olah dibuat untuk kepentingan tertentu.

Dampak Kegagalan Komunikasi Publik terhadap Tata Kelola Organisasi

a. Erosi Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintahan dan mengambil peran sebagai landasan legitimasi dan kohesi sosial (Prasetyo & Kriswibowo, 2022). Modal sosial, termasuk kepercayaan, berkontribusi signifikan terhadap efektivitas administrasi publik di era digital (Hatta & Suparman, 2025). Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan, pemerintah dapat memanfaatkan komunikasi dialogis melalui media

sosial agar tercipta iklim keterbukaan yang pasti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada pemerintah.

Akan tetapi, jika tidak berhati-hati, kegagalan komunikasi publik dapat mengikis kepercayaan ini dengan cepat, terutama dalam era media sosial dimana informasi dapat menyebar dengan kecepatan tinggi. Dalam kasus Hasan Nasbi, kontroversi ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas kebijakan komunikasi pemerintah di masa depan.

b. Penurunan Kredibilitas Institusional

Kegagalan komunikasi publik tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada integritas institusi secara keseluruhan. Hal ini bisa dipahami karena persoalan ini tidak hanya terkait dengan kualitas moral seseorang, tetapi juga pada sistem yang tidak kondusif (Latifah et al., 2025). Dalam kasus Hasan Nasbi ini, kontroversi yang timbul berpotensi merusak citra Kantor Komunikasi Kepresidenan dan bahkan pemerintahan secara umum. Perlu diingat bahwa integritas institusional dibangun melalui konsistensi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Jadi, ketika pejabat publik gagal menunjukkan keutamaan moral yang diharapkan, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Kredibilitas institusional merupakan sesuatu yang sulit dibangun namun mudah hancur. Kegagalan komunikasi publik dapat menggerus kredibilitas institusi dan membutuhkan upaya ekstra untuk memulihkannya. Penurunan kredibilitas tidak hanya berdampak pada aspek komunikasi, tetapi juga dapat meluas ke aspek-aspek lain dari pemerintahan. Misalnya, masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap komunikasi yang dilakukan pemerintah mungkin juga akan meragukan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Gangguan terhadap Efektivitas Kebijakan

Komunikasi publik yang efektif merupakan prasyarat untuk implementasi kebijakan yang berhasil. Perlu adanya suatu kesadaran bersama dari perumus dan pemangku kebijakan untuk menciptakan strategi komunikasi yang baik sebagai alat untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif (Rasyid et al., 2025). Ketika komunikasi publik terganggu akibat kontroversi, hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pesan kebijakan dengan efektif. Dalam ranah yang lebih luas, persoalan dalam komunikasi publik dapat berpengaruh juga terhadap legitimasi pemerintahan dan dukungan publik terhadap agenda pembangunan nasional.

Kasus Hasan Nasbi semakin mempertegas banyak komunikasi pemerintah Indonesia saat ini memang buruk. Sebagian besar kritik yang muncul menyoroti kurangnya empati, transparansi, dan responsifitas dalam komunikasi pemerintah ketika menanggapi isu-isu publik. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyoroti pola komunikasi politik yang dibangun oleh Staf Komunikasi Kepresidenan terlalu defensif dan argumentatif. Ia menilai gaya komunikasi Hasan Nasbi masih mirip dengan gaya komunikasi kampanye, padahal komunikasi di lingkungan kepresidenan seharusnya mengedepankan diplomasi publik dan strategi yang dapat merangkul semua pihak. Menurutnya hal ini bisa memunculkan sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo (Rahmawati, 2025).

Framework Perbaikan Tata Kelola Organisasi yang Dibutuhkan

a. Pentingnya Pemahaman Konteks

Seorang komunikator publik wajib mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik di wilayah tempatnya bertugas. Pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan politik adalah dasar utama dalam komunikasi publik yang

efektif. Dinamika masyarakat, nilai-nilai lokal, serta isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi penerimaan pesan harus dipahami oleh seorang komunikator publik. Absennya pemahaman ini berpotensi membuat komunikasi menghadapi resistensi atau bahkan memicu kontroversi yang memperburuk citra organisasi. Pengetahuan konteks juga memungkinkan perumusan pesan yang lebih mengena dan dekat dengan situasi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman konteks memperkuat legitimasi organisasi di mata publik.

Ada beragam cara yang bisa diusahakan untuk memahami konteks. Misalnya dengan melakukan pemetaan sosial dan budaya secara rutin sebelum menyusun pesan yang akan dikomunikasikan. Setiap organisasi publik juga bisa membentuk tim riset internal yang bertugas mengumpulkan informasi konteks lokal. Setelah itu, organisasi publik bisa melibatkan tokoh masyarakat atau komunitas dalam uji coba pesan publik. Pemahaman juga dapat diupayakan dengan memanfaatkan analisis media sosial untuk mengukur sensitivitas publik terhadap isu tertentu. Yang tidak kalah penting adalah dengan mengadakan forum diskusi rutin dengan segenap stakeholder untuk memperbarui wawasan tentang konteks social budaya, dan politik dimana organisasi publik berada.

b. Pentingnya Pelatihan Etika Komunikasi

Kasus Hasan Nasbi menunjukkan pentingnya pelatihan etika komunikasi bagi pejabat publik, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik. Pelatihan etika komunikasi bukan sekadar soal keterampilan berbicara, tetapi menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan kemampuan menghindari manipulasi informasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa mayoritas komunikator publik menghadapi dilema etis dalam praktik sehari-hari, khususnya di era digital (Andini et al., 2024). Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup kode etik profesi, simulasi kasus nyata, serta pengembangan karakter. Retret atau sesi reflektif juga dapat memperkuat kesadaran moral pejabat publik. Oleh karena itu, hal ini juga seharusnya menjadi materi wajib dalam kegiatan ret-ret bagi para pejabat publik yang secara rutin dilaksanakan di awal masa jabatan di Magelang. Implementasi pelatihan ini akan mencegah kasus komunikasi publik yang kontraproduktif, seperti yang pernah terjadi pada tokoh-tokoh pejabat yang tidak menguasai etika komunikasi.

c. Kebutuhan akan Sistem Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan komunikasi publik sejalan dengan prinsip etika dan tujuan organisasi. Tanpa mekanisme ini, pelanggaran etika berpotensi terulang tanpa perbaikan yang nyata. Evaluasi harus mencakup audit komunikasi, masukan dari masyarakat, serta pemantauan internal atas setiap pesan publik. Studi menekankan pentingnya kode etik, mekanisme orientasi, serta sistem konsultasi internal dalam mendukung tata kelola komunikasi yang baik (Musaraj & Gerxhi, 2010). Selain itu, audit etika dapat menjadi alat untuk mengukur integritas organisasi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Adapun langkah praktis yang mendukung hal ini adalah dengan membentuk unit pengawasan komunikasi yang independen dalam organisasi. Survei publik secara berkala perlu juga dilakukan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat. Selain itu, organisasi publik perlu menerapkan sistem pelaporan anonim bagi pegawai yang menemukan pelanggaran etika. Organisasi publik perlu menerapkan indikator kinerja (KPI) komunikasi publik berbasis etika dalam penilaian pegawai. Terakhir, perlu adanya audit komunikasi tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap kode etik setiap pejabat di organisasi publik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik adalah faktor krusial dalam membangun dan mempertahankan legitimasi pemerintahan. Kasus kontroversi yang melibatkan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

memberikan pembelajaran bermakna tentang dampak kegagalan etika komunikasi terhadap kredibilitas institusional. Dari perspektif *virtue ethics* Aristoteles, kegagalan utama dalam kasus ini ada pada kurangnya *phronesis* (kebijaksanaan praktis) dan keutamaan moral lainnya seperti empati dan sensitivitas kontekstual. Kegagalan ini tidak hanya berimbas pada individu yang terlibat, tetapi juga pada integritas dan kredibilitas institusi secara keseluruhan. Dampak kegagalan komunikasi publik meliputi penurunan kepercayaan publik, kemunduran kredibilitas institusional, dan gangguan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah moral yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa, diperlukan pengembangan *framework* etika komunikasi yang jelas dalam organisasi pemerintahan. *Framework* ini harus mencakup pelatihan etika komunikasi, sistem kontrol dan evaluasi, serta mekanisme untuk memastikan bahwa komunikator publik memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks di mana mereka beroperasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keutamaan moral bagi pejabat publik, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *virtue ethics* yang menekankan bahwa tindakan etis muncul dari karakter yang baik dan keutamaan moral yang kuat. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan program pelatihan komprehensif tentang etika komunikasi publik, menetapkan standar etika yang jelas untuk komunikator publik, dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa komunikasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Andini, R. T., Ainiyah, L., & Setiyadi, B. (2024). Tantangan dan etika komunikasi humas dalam era digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5837–5841. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Aristoteles. (2009). *The Nicomachean Ethics* (D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Ayu, R. D. (2025, April 29). *Sederet Kontroversi Hasan Nasbi yang Mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/sederet-kontroversi-hasan-nasbi-yang-mundur-sebagai-kepala-kantor-komunikasi-kepresidenan-1284781#goog_rewarded
- Broom, G. M., & Sha, B.-L. (2013). *Effective Public Relations* (11th ed.). Pearson Education Limited.
- Buana, G. (2025, April 29). *5 Fakta Perjalanan Hasan Nasbi Menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kini Resmi Mundur*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/765937/5-fakta-perjalanan-hasan-nasbi-menjadi-kepala-kantor-komunikasi-kepresidenan-kini-resmi-mundur#goog_rewarded
- Foot, P. (2001). *Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy*. Oxford University Press.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. CBS College Publishing.
- Harbowo, N., & Susilo, N. (2025, April 29). *Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gerindra Soroti Masalah Komunikasi*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/hasan-nasbi-mundur-dari-kepala-kantor-komunikasi-presiden-gerindra-soroti-masalah-komunikasi>
- Hatta, M., & Suparman. (2025). Relasi modal sosial dan efektivitas administrasi publik dalam era digitalisasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 254–261. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Hursthouse, R., & Pettigrove, G. (2023). *Virtue Ethics*. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/#toc>

- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations Issue dan Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis, dan Kualitatif*. Kencana Predana Media Group.
- Latifah, I., Wardani, S. A., & Hayat. (2025). Peran etika dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02(03), 579–587. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Lee, M. (Ed.). (2008). *Government Public Relations: A Reader*. Taylor & Francis Group.
- MacIntyre, A. (2007). *After virtue: a study in moral theory* (3rd ed.). University of Notre Dame Press.
- Musaraj, A., & Gerxhi, J. (2010). Communication and ethical behavior in the public service: From a moral choice toward a legal code. *Academicus: International Scientific Journal*, 1(1), 11–21.
- Prasetyo, K., & Kriswibowo, A. (2022). Public trust pada pemerintah daerah dalam penanganan pandemic covid-19. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(1), 25–38.
- Putra, D. K. S. (2024). Power relations between media and politics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(2), 143–152. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.41184>
- Rahmawati, B. (2025, April 9). *Kerap memicu Kontroversi, Pemerintah Diminta Memperbaiki Cara Berkomunikasi ke Publik*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/kerap-memicu-kontroversi-pemerintah-diminta-memperbaiki-cara-berkomunikasi-ke-publik/>
- Rasyid, H. F. Al, Florencia, S., Zahra, L. A. M., & Manggalou, S. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Kecamatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 22–29. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons. www.wileypluslearningspace.com
- Sherman, N. (1989). *The Fabric of Character. Aristotle's Theory of Virtue*. Oxford University Press.
- Tench, R., & Yeomans, L. (2009). *Exploring Public Relations* (2nd ed.). Pearson Education Limited. www.pearson-books.com
- Wijayaatmaja, Y. P. (2025, April 29). *Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Juru Bicara Presiden*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/765929/hasan-nasbi-mundur-dari-jabatan-juru-bicara-presiden>



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**